

BASKOM SETARA

INOVASI TATA KELOLA PENDIDIKAN KESETARAAN
BERBASIS KOMUNITAS



Penulis:

Melati Indri Hapsari, S.KM., M.Kes.

Wiwik Kus Endah, S.Pd., M.Pd.

Priyo Aris Abimanyu, M.Kom.

Ratna Arifah, S.Pd., M.Si.

Ulfa Noviana, S.E., M.Si.

BASKOM SETARA

**Inovasi Tata Kelola Pendidikan
Kesetaraan Berbasis Komunitas**

Melati Indri Hapsari, S.KM., M.Kes.

Wiwik Kus Endah, S.Pd., M.Pd.

Priyo Aris Abimanyu, M.Kom.

Ratna Arifah, S.Pd., M.Si.

Ulfa Noviana, S.E., M.Si.

BASKOM SETARA

Inovasi Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan Berbasis Komunitas

Penulis:

Melati Indri Hapsari, S.KM., M.Kes.
Wiwik Kus Endah, S.Pd., M.Pd.
Priyo Aris Abimanyu, M.Kom.
Ratna Arifah, S.Pd., M.Si.
Ulfa Noviana, S.E., M.Si.

Editor : Dr. Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.
Heri Martono, S.S., M.Pd.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : vii, 118
ISBN : 978-634-7522-82-5
Terbit Pada : Juli 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku BasKom Setara: Inovasi Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan Berbasis Komunitas ini dapat tersusun dengan baik. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun, tantangan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat gap akses pendidikan bagi kelompok tertentu, terutama yang kita kenal sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Dalam upaya menjembatani kesenjangan tersebut, kehadiran pendidikan nonformal melalui jalur pendidikan kesetaraan menjadi sangat krusial. Namun, pendekatan konvensional saja tidaklah cukup. Kita memerlukan inovasi yang lebih menyentuh akar rumput, yang berangkat dari realitas sosial dan potensi unik di setiap wilayah.

Buku ini memperkenalkan inovasi BasKom Setara, sebuah pendekatan transformatif yang menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek atau penerima manfaat, melainkan sebagai subjek sekaligus pengelola pendidikan. Melalui prinsip *Local Needs-Based*, inovasi ini memastikan bahwa kurikulum tidak hanya mengejar ketuntasan akademik, tetapi juga menjawab tantangan ekonomi dan budaya lokal.

Karakteristik utama BasKom Setara mulai dari partisipasi aktif komunitas, fleksibilitas metode, hingga orientasi pada pemberdayaan menjadi kunci keberhasilan dalam menekan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap lulusan Paket A, B, dan C tidak hanya memegang ijazah yang diakui secara formal, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan kemandirian yang berakar pada kearifan lokal.

Sebagai Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi. Buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi para pendidik, pengelola PKBM, SKB, serta pemangku kepentingan di daerah dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan.

Semoga inovasi BasKom Setara ini dapat diimplementasikan dengan optimal, menjadi sarana transformasi sosial, dan membawa dampak nyata bagi peningkatan indeks pembangunan manusia, khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Selamat membaca dan teruslah berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, Mei 2026

Dr. Nugraheni Triastuti, S.E., M.Si.
Penulis

PRAKATA

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan secara layak. Hal ini menuntut adanya terobosan inovatif, kontekstual, dan partisipatif melalui pendekatan berbasis komunitas.

Inovasi ini dikembangkan dengan mengintegrasikan potensi lokal, partisipasi aktif masyarakat, serta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan pendekatan berbasis komunitas, diharapkan pendidikan kesetaraan tidak hanya berfungsi sebagai jalur alternatif, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan yang mampu meningkatkan keterampilan hidup, karakter, dan kemandirian peserta didik.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik melalui gagasan, kritik, maupun saran konstruktif. Semoga inovasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi upaya pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta mendukung terwujudnya pemerataan pendidikan yang berkeadilan di Indonesia melalui pendidikan kesetaraan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN: WAJAH BARU PENDIDIKAN KESETARAAN	1
A. Kontribusi Pendidikan Kesetaraan dalam Sistem Pendidikan Nasional	1
B. Tantangan Kontemporer Tata Kelola Nonformal	3
C. Mengapa Harus Berbasis Komunitas?	5
BAB 2 LANDASAN TEORETIS DAN REGULASI TATA KELOLA PENDIDIKAN NONFORMAL	8
A. Konsep Dasar Tata Kelola (<i>Governance</i>) Pendidikan	8
B. Bingkai Regulasi Pendidikan Kesetaraan.....	10
C. Mengurai Konsep Pemikiran Pendidikan Kesetaraan	13
BAB 3 ARSITEKTUR TATA KELOLA LEMBAGA BERBASIS KOMUNITAS.....	21
A. Menenal Model BasKom Setara.....	21
B. Karakteristik Utama BasKom Setara: Ciri Khas Model Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan Berbasis Komunitas	22
C. Memahami BasKom Setara Melalui Diagram Model.....	28
BAB 4 DARI KOMUNITAS HINGGA DAMPAK: RUANG LINGKUP BASKOM SETARA	69
A. Profil Lulusan BasKom Setara: Kompeten, Mandiri, dan Berdaya Saing	69
B. Peta Materi Pembelajaran BasKom Setara: Apa yang Dipelajari Warga Belajar.....	73
C. Penggerak Komunitas: Motor Perubahan dalam Pendidikan Kesetaraan.....	75
D. Menata Fasilitas Pembelajaran di Komunitas.....	76

E. Mengelola Pembelajaran yang Fleksibel, Inklusif, dan Bermakna.....	77
F. Mengelola Pembiayaan Pendidikan yang Transparan, Efektif, dan Berkelanjutan	87
BAB 5 MENGAWAL MUTU BASKOM SETARA: MEMBANGUN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN.....	90
A. Monitoring BasKom Setara: Mengawal Proses Menuju Hasil yang Berkualitas	90
B. Evaluasi BASKOM SETARA: Mengukur Hasil, Dampak, dan Arah Perbaikan.....	94
C. Tindak Lanjut BasKom Setara: Mengubah Temuan Menjadi Perbaikan Nyata	96
BAB 6 PENUTUP: MENATAP MASA DEPAN PENDIDIKAN KESETARAAN	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
GLOSARIUM	106
INDEKS	111
BIOGRAFI PENULIS.....	114

BAB 1

PENDAHULUAN: WAJAH BARU PENDIDIKAN KESETARAAN

A. Kontribusi Pendidikan Kesetaraan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa memandang usia, latar belakang sosial, atau kondisi ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak individu yang tidak menyelesaikan pendidikan formal karena berbagai kendala, seperti kemiskinan, keterbatasan akses geografis, pernikahan dini, dan tuntutan kerja. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah menyediakan program pendidikan kesetaraan sebagai bentuk layanan alternatif pendidikan nonformal yang setara dengan pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Di Indonesia, pendidikan kesetaraan meliputi Program Paket A (setara SD/MI), Paket B (setara SMP/MTs), dan Paket C (setara SMA/MA). Program ini menjadi bagian penting dalam Sistem Pendidikan Nasional karena menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi.

Pendidikan kesetaraan memiliki peran strategis dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai sarana pemerataan akses pendidikan, penuntasan wajib belajar, pengurangan angka putus sekolah, serta pengembangan sumber daya manusia. Melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C, pendidikan kesetaraan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan penguatan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, dan dukungan berbagai pihak, pendidikan kesetaraan dapat semakin berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional.

Perlu pendekatan penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan yang semakin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan, lebih mudah dan lebih dekat. Pendekatan berbasis komunitas dipandang strategis untuk mendesain dan mengembangkan pendidikan kesetaraan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan. Inovasi penyelenggara Pendidikan Kesenjangan diharapkan tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga memperkuat kapasitas komunitas dalam menciptakan ekosistem belajar yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Inovasi pendidikan berbasis komunitas untuk Pendidikan kesetaraan ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan lapangan secara nyata, meningkatkan mutu layanan pendidikan nonformal, dan menciptakan kemandirian masyarakat dalam mengelola pendidikan. Inovasi ini diharapkan mampu menjadi solusi inovatif dalam mendukung tujuan pendidikan untuk semua (*Education for All*) dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

Keterkaitan utama BASKOM SETARA dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terdapat pada SDG 4: *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas) yang bertujuan menjamin pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Beberapa bentuk keterkaitan BASKOM SETARA dengan SDGs antara lain:

1. Mendukung Pendidikan Inklusif dan Merata (SDG 4)
2. Mendorong Pembelajaran Sepanjang Hayat
3. Penguatan Pemberdayaan Masyarakat (SDG 1 dan SDG 8)
4. Mengurangi Kesenjangan Sosial (SDG 10)
5. Membangun Kemitraan dan Kolaborasi (SDG 17)

Secara konseptual, BASKOM SETARA menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan tidak hanya menjadi alternatif pendidikan formal, tetapi juga instrumen pembangunan sosial berkelanjutan. Inovasi ini relevan dengan agenda global SDGs karena mengintegrasikan pendidikan, pemberdayaan komunitas, pengurangan kesenjangan, dan pembangunan manusia secara holistik. Hal tersebut sesuai dengan Asta Cita yaitu 1) Indonesia yang maju, mandiri dan kompetitif; 2) Masyarakat yang sejahtera.

B. Tantangan Kontemporer Tata Kelola Nonformal

Pemerataan pendidikan sebagai salah satu cara mencapai dua asta cita di atas belum sepenuhnya terlaksanakan. Hal tersebut didukung dengan data capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, khususnya pada usia 7-15 tahun dan 16-18 tahun. Data ini diperoleh dari capaian SPM pada rapor pendidikan. Pada kelompok usia 7-15 tahun, APS mencapai 98,76% (kategori tinggi), dimana capaian ini tidak berubah dibandingkan tahun lalu. Namun, pada kelompok usia 16-18 tahun, APS hanya sebesar 71,59% dimana ini masih tergolong rendah, meskipun ada peningkatan 0,73 poin dari tahun sebelumnya. Untuk usia 5-6 tahun, APS tercatat sebesar 85,55% (kategori sedang), mengalami penurunan sebesar 1,57 poin dibandingkan tahun 2024. (Rapor Pendidikan, 2025).

Data Angka Tidak Sekolah (ATS) juga menjadi indikator penting dalam melihat tantangan implementasi wajib belajar 13 tahun. Pada Sistem Manajemen Data ATS Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diketahui ATS di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 327.617 anak, dimana yang telah berhasil diverifikasi sebanyak 43.833 anak (13,37%). Alasan anak tidak sekolah berdasarkan hasil verifikasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1: Alasan Anak Tidak Sekolah di Provinsi Jawa Tengah

Alasan	Jumlah Anak	Persentase
Bekerja	19.746	45,05
Tidak mau sekolah	7.948	18,13
Tidak ada biaya	3.864	8,82
Sudah cukup sekolahnya	3.301	7,53
Menikah	1.689	3,85
Masalah kesehatan (disabilitas)	910	2,08
Pengaruh lingkungan (teman)	553	1,26
Sekolah jauh dari rumah	98	0,22
Sekolah tidak penting	66	0,15
Mengalami perundungan/trauma di sekolah	37	0,08

Alasan	Jumlah Anak	Persentase
Tidak memiliki Akta Kelahiran	4	0,01
Lainnya	5.617	12,81
Total	43.833	100,00

Sumber: Sistem Manajemen Data Anak Tidak Sekolah, Pusdatin, 2025

Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, khususnya pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan menengah, sehingga memerlukan upaya inovatif layanan yang lebih adaptif untuk mendorong peningkatan APS secara menyeluruh. Pendidikan kesetaraan hadir sebagai solusi bagi anak bangsa yang tidak sempat menempuh pendidikan formal, agar memperoleh hak pendidikan yang setara. Pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B, dan C diharapkan mampu menjadi alternatif yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, capaian APS untuk usia 7–18 tahun pada jalur pendidikan kesetaraan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 masih rendah, hanya sebesar 23,2%. Kondisi ini menuntut adanya inovasi layanan pendidikan kesetaraan yang lebih adaptif, agar mampu menjangkau anak-anak yang terhambat di jalur formal dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Meskipun telah berjalan, program pendidikan kesetaraan di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi warga belajar, kurangnya inovasi pembelajaran, dan keterbatasan sumber daya pendidik. Di sisi lain, banyak komunitas memiliki potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang kuat yang belum secara optimal diberdayakan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Komunitas memiliki kedekatan emosional, pemahaman konteks lokal, serta jaringan sosial yang dapat menjadi kekuatan dalam meningkatkan efektivitas program pendidikan kesetaraan.

Kenyataan di lapangan, Pendidikan Kesetaraan yang mencakup Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA, yang menjadi salah satu jalur pendidikan nonformal belum sepenuhnya berhasil meluluskan anak-anak tidak sekolah yang kembali ke sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

(2021) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar, antara lain:

1. Relevansi materi pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan konteks kehidupan peserta didik (Mulyasa, 2017).
2. Rendahnya partisipasi komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program (Sutarto, 2019).
3. Keterbatasan sumber daya baik dari segi pendidik, sarana prasarana, maupun pendanaan (Kemendikbudristek, 2022).

C. Mengapa Harus Berbasis Komunitas?

Merespons kondisi di lapangan perlu adanya solusi untuk meluluskan anak-anak tidak sekolah yang kembali ke sekolah melalui jalur Pendidikan Kesetaraan. Solusi dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Teori *Community-Based Education* yang dikembangkan oleh Freire (1970) dan dipertegas oleh Rogers (2004) menekankan bahwa proses pendidikan akan lebih efektif apabila berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi, kontekstualitas, dan pemberdayaan, sehingga murid tidak hanya memperoleh pengetahuan akademis tetapi juga keterampilan hidup (*life skills*) yang relevan dengan realitas sosial-ekonomi mereka.

Inovasi Model Pendidikan Berbasis Komunitas untuk Pendidikan Kesetaraan (BasKom Setara) ini memiliki keunggulan, sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan potensi, budaya, dan kearifan lokal ke dalam pembelajaran (*contextual learning*).
2. Melibatkan masyarakat, tokoh lokal, dan organisasi komunitas secara aktif (*participatory approach*).
3. Mengembangkan keterampilan vokasional dan kewirausahaan untuk kemandirian ekonomi (*empowerment*).
4. Fleksibel dan adaptif dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Berdasarkan keunggulan tersebut maka model ini dapat menjadi alternatif dalam tata kelola penyelenggaraan pendidikan kesetaraan agar merata dan inklusi.

Tujuan Model Pendidikan Berbasis Komunitas Untuk Pendidikan Kesetaraan (BasKom Setara) adalah mengembangkan sistem pendidikan kesetaraan yang inklusif, relevan, partisipatif, dan berbasis potensi lokal guna memperluas akses, meningkatkan mutu, serta memberdayakan peserta didik dan komunitas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, mandiri dan mampu berdaya saing. Secara spesifik tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Memperluas akses pendidikan bagi warga masyarakat yang belum atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal, terutama kelompok inklusi, kelompok marjinal, daerah tertinggal, dan komunitas terpencil.
2. Menyediakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan, potensi, dan konteks kehidupan peserta didik melalui integrasi potensi lokal dan kearifan budaya.
3. Mendorong partisipasi aktif komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan kesetaraan, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
4. Mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) dan vokasional yang mendukung kemandirian ekonomi peserta didik serta meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja dan wirausaha.
5. Memperkuat kapasitas pendidik dan pengelola dalam menerapkan metode pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pemberdayaan.
6. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, untuk mendukung keberlanjutan program.
7. Meningkatkan motivasi belajar dan keberlanjutan pendidikan melalui pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, inklusif, dan memberdayakan.

Manfaat Model Pendidikan Berbasis Komunitas Untuk Pendidikan Kesetaraan (BasKom Setara) antara lain:

1. Bagi Warga Belajar

Meningkatkan akses, motivasi, dan keberhasilan dalam mengikuti pendidikan kesetaraan yang relevan dengan kebutuhan hidup dan lingkungan mereka.

2. Bagi Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan
Menjadi panduan dalam merancang dan mengimplementasikan program yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik komunitas.
3. Bagi Komunitas
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pendidikan warga, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong kemandirian komunitas dalam bidang pendidikan.
4. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
Memberikan model alternatif yang dapat direplikasi dan diadopsi dalam kebijakan pendidikan inklusif dan pemerataan layanan Pendidikan.
5. Bagi Praktisi Pendidikan
Menyediakan strategi pembelajaran yang kontekstual dan dapat diterapkan dalam berbagai lingkungan sosial.

BAB 2

LANDASAN TEORETIS DAN REGULASI TATA KELOLA PENDIDIKAN NONFORMAL

A. Konsep Dasar Tata Kelola (*Governance*) Pendidikan

Pendidikan adalah hak dasar setiap manusia. Pendidikan bukan hanya proses memperoleh pengetahuan, tetapi merupakan sarana transformasi diri dan sosial. Pendidikan membuka ruang untuk memahami jati diri, mengenali potensi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kerangka filosofis yang mendalam, pendidikan adalah hakikat dari proses pemanusiaan manusia. Paulo Freire, dalam *Pedagogy of the Oppressed*, menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah dialogis dan membebaskan. Pendidikan memutus rantai penindasan dan mengangkat manusia menjadi subjek sejarahnya sendiri.

Pendidikan harus menjadi kekuatan pemberdayaan pada masyarakat yang masih mengalami ketimpangan sosial, ekonomi, dan kultural. Pendidikan tidak hanya mengajar, tetapi membangkitkan kesadaran kritis; tidak hanya melatih keterampilan, tetapi membangun kemandirian; tidak hanya mencetak individu cerdas, tetapi melahirkan warga negara yang berani memperjuangkan keadilan. Melalui pendidikan yang memberdayakan, setiap individu, tanpa kecuali, diberi ruang untuk tumbuh dan mengambil peran aktif dalam perubahan sosial.

Selanjutnya kesetaraan hak dalam pendidikan menuntut pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman kondisi peserta didik, termasuk masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem formal. Pendidikan kesetaraan hadir sebagai upaya korektif dan afirmatif, untuk menjangkau mereka yang tertinggal bukan karena kurangnya potensi, tetapi karena ketidakadilan dalam akses. Dalam kerangka ini, pendidikan

BAB 3

ARSITEKTUR TATA KELOLA LEMBAGA BERBASIS KOMUNITAS

A. Mengenal Model BasKom Setara

Beberapa pengertian terkait dengan Model Pendidikan Berbasis Komunitas Untuk Pendidikan Kesetaraan (BasKom Setara) antara lain pendidikan berbasis masyarakat, pendidikan kesetaraan, komunitas, anak tidak sekolah. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat (UU No. 20 tahun 2003).

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C (UU No. 20 tahun 2003). Komunitas merupakan sekelompok orang yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki kepentingan serta nilai-nilai sosial yang sama untuk mencapai tujuan bersama (Soerjono Soekanto, 2012). Anak Tidak Sekolah adalah peserta didik usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan formal dan nonformal, baik karena putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus jenjang tertentu (Kemendikbudristek, 2022).

Dari beberapa pengertian di atas maka model pendidikan berbasis komunitas untuk pendidikan kesetaraan adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi program pendidikan kesetaraan. Model ini menempatkan komunitas sebagai subjek utama dalam proses pendidikan sehingga program yang

BAB 4

DARI KOMUNITAS HINGGA DAMPAK: RUANG LINGKUP BASKOM SETARA

A. Profil Lulusan Baskom Setara: Kompeten, Mandiri, dan Berdaya Saing

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan murid dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan dirumuskan berdasarkan tujuan pendidikan nasional; tingkat perkembangan murid; kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan murid dari satuan pendidikan.

Standar Kompetensi Lulusan mencakup 8 (delapan) dimensi profil lulusan yang harus dikuasai pada akhir setiap jenjang pendidikan, yaitu: keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; kewargaan; penalaran kritis; kreativitas; kolaborasi; kemandirian; kesehatan; dan komunikasi. Dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengacu pada individu yang memiliki keyakinan dan mengamalkan ajaran agama/kepercayaannya, berakhlak mulia, serta menjaga hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, dan lingkungan. Dimensi kewargaan mengacu pada individu yang bangga akan identitas dan budayanya, menghargai keberagaman, menjaga persatuan bangsa, menaati aturan bernegara dan bermasyarakat, serta menjaga keberlanjutan kehidupan, lingkungan, dan harmoni antarbangsa. Dimensi penalaran kritis mengacu pada individu yang memiliki rasa ingin tahu, mampu berpikir logis dan analitis, serta mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan, berargumentasi logis,

BAB 5

MENGAWAL MUTU BASKOM SETARA: MEMBANGUN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN

A. Monitoring BasKom Setara: Mengawal Proses Menuju Hasil yang Berkualitas

Pemantauan berkala perlu dilakukan untuk mengetahui indikator keberhasilan dan komponen-komponen yang harus dipatuhi selama pembelajaran agar program dapat berjalan secara efektif dan efisien. *Monitoring* dalam konteks ini bukan sekadar pengawasan administratif, tetapi juga memastikan mutu pembelajaran, keterlibatan komunitas, dan keberlanjutan program.

Monitoring dalam pelaksanaan model pendidikan berbasis komunitas untuk pendidikan kesetaraan merupakan proses pemantauan secara sistematis terhadap seluruh kegiatan program agar pelaksanaan pendidikan berjalan sesuai tujuan, kebutuhan masyarakat, serta standar pendidikan nonformal. *Monitoring* dilakukan secara berkala mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, keterlibatan masyarakat, hingga evaluasi hasil belajar warga belajar.

Dalam pendidikan kesetaraan berbasis komunitas, *monitoring* tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk memastikan program benar-benar relevan dengan kebutuhan lokal. *Monitoring* dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pengelola program, tutor, warga

BAB 6

PENUTUP: MENATAP MASA DEPAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dapat diakses secara adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui buku *BASKOM SETARA: Inovasi Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan Berbasis Komunitas* ini, telah dipaparkan bahwa pendidikan kesetaraan bukan sekadar jalur alternatif pendidikan formal, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan transformasi sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Konsep pendidikan berbasis komunitas yang diusung dalam model BasKom Setara menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pendidikan, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan, kontekstual, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Model pendidikan berbasis komunitas untuk pendidikan kesetaraan merupakan pendekatan strategis dalam upaya meningkatkan akses, relevansi, dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sistem pendidikan formal, khususnya kelompok *Anak Tidak Sekolah (ATS)* dan masyarakat marjinal. Model ini menempatkan komunitas sebagai pusat dari proses pendidikan, baik sebagai perencana, pelaksana, maupun pengendali program.

Keterlibatan aktif masyarakat, lembaga lokal, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, menyebabkan pendidikan kesetaraan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini mendorong lahirnya pembelajaran yang kontekstual, relevan dengan kebutuhan lokal, serta berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan. Model pendidikan berbasis komunitas mampu menjawab tantangan pemerataan

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah : Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama
- Achmad Nasihi, & Tri Asihati Ratna Hapsari. (2022). *Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan*. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 77–88. <https://doi.org/10.56855/intel.v1i1.112>
- Agustina, A. A. A. (2020). *Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C Vokasional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bhina Swakarya Kabupaten Bandung*. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 9(2), 118–125. <https://doi.org/10.21009/JEP.092.03>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi*. Jakarta: BPS
- Chapman, S.C., Sawitzke, A.L., Campbell, D.S., and Schoenwolf, G.C. (2005). A Three-Dimensional Atlas Of Pituitary Gland Development In The Zebrafish. *The Journal of comparative neurology* 487(4): 428-440 (Journal)
- Daniels, Harry. (2001). *Vygotsky and Pedagogy*. London: Routledge
- Diana, R. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Siswa Putus Sekolah*. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 96
- Dongoran, . F. R., Naddya, A. ., Nuraini, . N., Aisah, N., Susanti, S., & Ridho, A. M. (2023). *Monitoring dan Evaluasi terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMP Terpadu Al-Farabi Tanjung Selamat*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1891–1898
- Freire, P. (1970). *Pedagogy Of The Oppressed*. New York: Continuum
- Giroux, Henry A. (1983). [*Theory And Resistance In Education: A Pedagogy For The Opposition*](#). South Hadley: Bergin & Garvey, ABC-CLIO, LLC
- Hayyi, A., Muslihatun, M., Mukhlisin, L., Awal, R., Hasanuddin, H., & Murcahyanto, H. (2023). *Evaluasi Program Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C di Lembaga Pendidikan Nonformal*.

- Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 6(2), 778–791. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7377>
- <https://bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id/2011/05/pengertian-perencanaan-tujuan.html>
- Kemendikbudristek. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Khusus*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Penjangkauan Anak Tidak Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2021. *Strategi Nasional Literasi Digital 2021–2024*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Perkuat Keberlanjutan Kualitas dan Replikasi Inovasi*. Jakarta: KemenPANRB.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2010). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan Kesetaraan*. Jakarta: Kemendikbud
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Pengantar Supervisi Akademik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025 *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Edisi Revisi*. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Kemendikbudristek.

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Strategi Nasional Penghapusan Anak Tidak Sekolah (ATS)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Profil Pendidikan Indonesia: Akses, Mutu, dan Pemerataan*. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Pendidikan Nonformal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurhayani, N., Rohmah, S., & Kusuma, D. F. W. (2025). *Efektivitas Manajemen Pendidikan Kesetaraan Paket C: Studi Kasus di PKBM Bina Cipta Ujungberung*. Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan, 4(4). <https://doi.org/10.56916/ejip.v4i4.2086>
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Kajian Efektivitas Pendidikan Kesetaraan Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud
- Rogers, A. (2004). *Non-Formal Education: Flexible Schooling Or Participatory Education?*. New York: Springer
- Rosenau, J. N., & Czempiel, E. O. (1992). *Governance Without Government: Order and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
- Sari, M. M., & Manar, D. G. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus: Program Nganter Anak Paud Dapat Lulus Ijazah SMA"

- Ternak Panda Lima"). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 799-810.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Supriyadi, D. (2004). *Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutarto. (2019). Pendidikan Berbasis Komunitas Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 85–96.
- Syaiful. (2021). *Kajian Model Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket Berbasis Komunitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sumenep*. Karaton: Jurnal Pembangunan Sumenep, 1(1).
- Tim Penyusun. 2025. *Panduan Penguatan Peran Komunitas*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Veer, & J. Valsiner (Eds.). (1994). *The Vygotsky Reader*. Oxford: Blackwell Publishers
- Vygotsky, L. S., & Luria, A. (1994). *Tool and Symbol in Child Development*. In R. Van Der
- Wrihatnolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 1996. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

GLOSARIUM

A

Akses Pendidikan = Kesempatan yang dimiliki setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Anak Tidak Sekolah (ATS) = Anak usia sekolah yang berada di luar sistem pendidikan formal maupun nonformal karena putus sekolah, belum pernah sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan.

Asesmen Formatif = Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki proses belajar.

Asesmen Sumatif = Penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

B

Balai Desa = Fasilitas umum desa yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan pembelajaran berbasis komunitas.

BasKom Setara = Model Pendidikan Berbasis Komunitas untuk Pendidikan Kesetaraan yang mengintegrasikan potensi lokal, partisipasi masyarakat, dan pendidikan nonformal.

Blended Learning = Model pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring.

C

Capaian Pembelajaran (CP) = Kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase pembelajaran sesuai ketentuan pemerintah.

Community-Based Education = Pendekatan pendidikan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan.

Contextual Learning = Pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik.

D

Daring = Pembelajaran yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan platform digital.

DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) = Mitra pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan kerja dan peluang usaha bagi peserta didik.

E

Environmental Input = Faktor lingkungan eksternal yang memengaruhi keberhasilan program pendidikan, seperti sosial, budaya, ekonomi, dan kebijakan.

Evaluasi = Proses sistematis untuk menilai efektivitas dan keberhasilan program pembelajaran.

F

Fasilitator = Pihak yang membantu proses pembelajaran dan pemberdayaan peserta didik dalam komunitas.

Forum Komunitas Pendidikan = Kelompok masyarakat yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan pendidikan berbasis komunitas.

H

Humanis = Pendekatan pendidikan yang menghargai nilai kemanusiaan, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik.

I

Inklusif = Prinsip pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang.

Instrumental Input = Sarana pendukung proses pendidikan seperti kurikulum, tutor, media pembelajaran, dan anggaran.

K

Kearifan Lokal = Nilai, budaya, tradisi, dan potensi daerah yang dijadikan sumber pembelajaran.

Kemitraan Strategis = Kerja sama antara komunitas, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak lain untuk mendukung program pendidikan.

Keterampilan Hidup (*Life Skills*) = Kemampuan praktis yang diperlukan peserta didik untuk menghadapi kehidupan sehari-hari secara mandiri.

Komunitas = Sekelompok orang yang memiliki kepentingan, nilai, dan tujuan bersama dalam suatu wilayah tertentu.

Kontekstual = Sesuai dengan kondisi nyata, kebutuhan, dan lingkungan peserta didik.

Kurikulum Kontekstual = Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan lokal dan potensi masyarakat.

L

Learning Outcome = Hasil belajar yang menunjukkan kompetensi peserta didik setelah mengikuti pembelajaran.

Lifelong Learning = Konsep belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Literasi Digital = Kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif, bijak, dan bertanggung jawab.

M

Monitoring = Kegiatan pemantauan program secara berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana.

N

Nonformal = Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara fleksibel.

P

Partisipatif - Melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Pembelajaran Mandiri = Proses belajar yang dilakukan peserta didik secara mandiri dengan tanggung jawab penuh terhadap pembelajarannya.

Pemberdayaan = Upaya meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing.

Penggerak Komunitas = Individu atau kelompok yang berperan menginisiasi dan mendukung pelaksanaan pendidikan berbasis komunitas.

Pendidikan Kesetaraan = Program pendidikan nonformal setara SD, SMP, dan SMA melalui Paket A, B, dan C.

PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) = Lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pembelajaran berbasis masyarakat.

Problem Based Learning = Metode pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran.

Project Based Learning = Metode pembelajaran yang menekankan penyelesaian proyek untuk mencapai kompetensi tertentu.

R

Raw Input = Peserta didik atau warga belajar yang menjadi sasaran utama program pendidikan.

Replikasi = Proses penerapan model pendidikan yang telah berhasil ke wilayah lain dengan penyesuaian lokal.

S

SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) = Lembaga pendidikan nonformal milik pemerintah yang menyediakan layanan pendidikan masyarakat.

SKK (Satuan Kredit Kompetensi) = Ukuran beban belajar dalam pendidikan kesetaraan yang menunjukkan pencapaian kompetensi peserta didik.

SPM (Standar Pelayanan Minimal) = Ketentuan minimal layanan pendidikan yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

Sustainability (Keberlanjutan) = Kemampuan program untuk terus berjalan dan berkembang secara mandiri dalam jangka panjang.

T

Tutor = Pendidik dalam pendidikan kesetaraan yang bertugas membimbing dan memfasilitasi pembelajaran peserta didik.

Tutorial = Bentuk pembelajaran berupa bimbingan belajar yang dilakukan tutor kepada peserta didik secara individual atau kelompok kecil.

V

Vokasional = Keterampilan yang berhubungan dengan dunia kerja dan keahlian praktis tertentu.

INDEKS

A

Administrasi keuangan, 30
Administrasi kurikulum dan pembelajaran, 29–30
Administrasi peserta didik, 29
Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, 29
Administrasi sarana dan prasarana, 30
Aksesibilitas, 14–15
Akuntabilitas, 27, 30
Anak Tidak Sekolah (ATS), 17, 32–35

B

BasKom Setara, 6, 17–24
Belajar mandiri, 14
Berbasis kebutuhan lokal, 18–19
Budaya lokal, 18, 20

C

Community-Based Education (CBE), 11–13

D

Dialog egaliter, 10
Digitalisasi administrasi, 28

E

Efektivitas dan efisiensi, 27, 30
Evaluasi program, 19, 28
Environmental input, 31–32

F

Fasilitator, 14, 24, 25
Fleksibilitas pembelajaran, 14, 19
Freire, Paulo, 7, 10–12

I

Inklusif, 15–16, 34

Instrumental input, 24–30

K

Karakteristik model, 18–23

Kearifan lokal, 18, 20

Kemitraan, 30, 32

Kemandirian masyarakat, 19, 22

Konstruktivisme sosial, 9–10

Kontekstualitas, 15

Kurikulum kontekstual, 24

L

Life skills, 13, 18, 21

Lifelong learning, 21

M

Manajemen dan organisasi, 24–30

Metode pembelajaran, 20

Model pendidikan berbasis komunitas, 17–23

Monitoring dan evaluasi, 24, 28

P

Partisipasi aktif komunitas, 19

Partisipatif, 15–16, 27

Pemberdayaan komunitas, 24

Pendidikan emansipatoris, 10–11

Pendidikan kesetaraan, 13–16, 17–23

Pendidikan nonformal, 13, 22

Pembelajaran sepanjang hayat, 21

Perencanaan partisipatif, 24, 32–35

PKBM, 13–15

Praksis, 10–11

Prinsip dasar SPNF, 14–16

R

Raw input, 24–25

S

Scaffolding, 9

Sense of ownership, 19, 33–34

SKB, 13–15

Sosial budaya, 31

SPNF, 13–16

Struktur organisasi, 28–29

Sumber daya lokal, 18–19

Sistem administrasi, 29–31

T

Tata kelola pendidikan kesetaraan, 26–28

Teori konstruktivisme sosial, 9–10

Transformasi sosial, 7, 23

Transparansi, 27, 30

Tutorial, 14, 20

V

Vygotsky, Lev, 9–10

Z

Zona Perkembangan Proksimal (ZPD), 9

BIOGRAFI PENULIS



Melati Indri Hapsari, S.KM, M.Kes.

Penulis lahir di Purwodadi Kabupaten Grobogan pada tanggal 6 November 1978. Penulis merupakan seorang profesional di bidang pendidikan yang telah mengabdikan diri sejak tahun 2001. Berbekal pengalaman panjang dalam dunia akademik dan praktik pendidikan, penulis memulai karier sebagai pendidik (pamong belajar pada pendidikan nonformal) dan terus berkembang hingga menjadi dosen di perguruan tinggi. Dalam perannya sebagai pendidik, penulis aktif mengajar, membimbing, mendampingi serta terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian terutama *research and development* di bidang pendidikan.

Selain itu, penulis juga berkiprah sebagai aparatur di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai jabatan fungsional Widyaprada pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah yang mempunyai tugas melakukan penjaminan mutu pendidikan. Pengalaman ini memperkaya wawasan penulis dalam mengintegrasikan teori dan praktik pendidikan secara komprehensif. Penulis memiliki minat khusus pada inovasi pembelajaran, digitalisasi pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dedikasi dan komitmen yang tinggi menjadikan penulis terus berkontribusi dalam memajukan sistem pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Karya terbaru dari penulis antara lain:

1. Book Chapter dengan judul *Dinamika dan Kebijakan Pendidikan*, 2026
2. Artikel dengan judul *Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Nonformal di Indonesia: Studi terhadap Program, Tantangan dan Dampaknya*

Saat ini penulis juga menjadi Fasilitator Koding dan Kecerdasan Artificial Jawa Tengah.

Email Penulis: melatikesling06@gmail.com

Email Penulis: lisna.lisnawati@umbandung.ac.id



Wiwik Kus Endah, S.Pd., M.Pd.

Wiwik Kus Endah merupakan seorang widyaprada dan praktisi pendidikan yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan mutu pendidikan, khususnya dalam bidang pembelajaran Bahasa Indonesia dan penjaminan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Negeri Semarang pada Program Studi Pendidikan

Bahasa Indonesia untuk jenjang Sarjana (S1) dan Magister (S2). Latar belakang akademik tersebut menjadi fondasi dalam pengembangan kompetensi profesional di bidang pendidikan, pelatihan, serta pendampingan satuan pendidikan.

Saat ini, Wiwik Kus Endah bertugas di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebagai Widyaprada Ahli Muda. Dalam pelaksanaan tugasnya, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan peningkatan mutu pendidikan, antara lain pendampingan implementasi kebijakan pendidikan, penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pengembangan pembelajaran, fasilitasi peningkatan literasi dan numerasi, serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program pendidikan di satuan pendidikan.

Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, Wiwik Kus Endah terus berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Tengah melalui kegiatan pemetaan mutu pendidikan, pendampingan dan pembimbingan, supervisi Pendidikan, dan pengembangan model penjaminan mutu Pendidikan.

Email Penulis: wiwikkusendah@gmail.com



Priyo Aris Abimanyu, M.Kom

Ketertarikan penulis terhadap ilmu komputer dimulai pada tahun 2003 semenjak menjadi ASN dan menjadi teknisi. Saat itu penulis juga menjadi tim pengembangan aplikasi komputer untuk pembelajaran. Selain menyelesaikan sarjana komputer di Universitas Dian Nuswantoro pada tahun 2000, penulis juga menyelesaikan paska sarjana di kampus yang sama di tahun 2007. Penulis mempunyai ketertarikan pada pengembangan penggunaan

komputer untuk media pembelajaran interaktif termasuk koding dan kecerdasan artifisial. Saat ini penulis sebagai widyaprada di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Email Penulis: jateng@gmail.com



Ratna Arifah, S. Pd., M. Si.

Penulis merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris dari IKIP PGRI Semarang pada tahun 1998. Selanjutnya penulis menjadi pegawai di LPMP Jawa Tengah pada tahun 2003 dengan menggunakan ijazah S1. Karena pada saat itu LPMP Jawa Tengah banyak melakukan kegiatan peningkatan kompetensi untuk seluruh guru mulai dari jenjang SD hingga SMA dan SMK, maka pegawai diambil dari lulusan kependidikan dengan latar belakang mata pelajaran yang beragam.

Pada tahun 2008 Kementerian Pendidikan Nasional mejalin beberapa perguruan tinggi yang salah satunya adalah Universitas Diponegoro pada program Beasiswa Unggulan. Penulis mengikuti seleksi program Beasiswa Unggulan tersebut dan lolos menjadi mahasiswa BU hingga lulus dari Universitas Dipenogoro pada tahun 2010 pada Prodi Administrasi Publik dengan Konsentrasi Pelayanan Pendidikan.

Penulis menjadi Widyprada Ahli Muda di BBPMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025. Dan pada tahun 2025 penulis melakukan kegiatan pengembangan model pendidikan kesetaraan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 mulai digunakan untuk menulis buku.

Email Penulis: ratnalpmpjateng20@gmail.com.



Ulfa Noviana, S.E, M.Si,

Anak ke 1 dari 3 bersaudara ini lahir di Semarang, 5 November 1980. Pendidikan yang ditempuh dimulai dari SD Negeri Srandol Kulon 02 tahun 1987, dilanjutkan ke SMP Negeri 27 Semarang tahun 1993, dilanjutkan ke SMK Negeri 02 Semarang tahun 1996. Telah menyelesaikan pendidikan D3 Kesekretariatan UNDIP di tahun 2002 yang kemudian melanjutkan pendidikan S1 Manajemen UNDIP lulus di tahun 2007.

Pada tahun 2014 telah menyelesaikan pendidikan Magister Sains di Universitas Stikubank Semarang. Penulis merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan sejak tahun 2002 hingga sekarang dan telah diangkat menjadi Widyaprada Ahli Muda. Penulis pernah bergabung di tim WBK/WBBM BBPMP Jawa Tengah dan bergabung di tim Pengembangan Model. Motto penulis adalah “jadikan Bismillah menjadi Alhamdulillah” yang menjadikan penulis terus melangkah maju kedepan.

Email : noviana.ardi3@gmail.com

BASKOM SETARA

INOVASI TATA KELOLA PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS KOMUNITAS

Buku *BASKOM SETARA: Inovasi Tata Kelola Pendidikan Kesetaraan Berbasis Komunitas* membahas model pendidikan kesetaraan yang dirancang untuk mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendekatan berbasis komunitas. Buku ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya pada kelompok usia sekolah menengah, serta tingginya angka ATS yang belum terlayani secara optimal melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Model Baskom Setara dikembangkan sebagai inovasi pendidikan yang mengintegrasikan potensi lokal, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C. Pendekatan ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberikan ijazah kesetaraan, tetapi juga membangun keterampilan hidup, kemandirian ekonomi, karakter, serta daya saing peserta didik.

Buku ini menjelaskan konsep dasar pendidikan berbasis komunitas, karakteristik model, tahapan implementasi, pengelolaan pembelajaran, monitoring dan evaluasi, hingga strategi keberlanjutan dan replikasi program. Dalam implementasinya, masyarakat dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan di lingkungan mereka. Selain membahas aspek akademik, Baskom Setara juga menitikberatkan pada pengembangan keterampilan vokasional, literasi digital, kewirausahaan, dan penguatan nilai-nilai sosial budaya lokal. Model ini dirancang fleksibel dalam waktu, tempat, dan metode pembelajaran sehingga dapat menjangkau peserta didik dari kelompok marjinal, daerah terpencil, maupun masyarakat dengan keterbatasan akses pendidikan formal. Melalui buku ini, penulis menawarkan sebuah model tata kelola pendidikan kesetaraan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Baskom Setara diharapkan menjadi solusi strategis dalam mendukung pemerataan pendidikan, pengentasan ATS, dan pembangunan sumber daya manusia yang mandiri, serta berdaya saing di Indonesia.